

**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

OLEH

**EVI SUSANTI
NPM: 221801039**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Bappedalitbang
Kabupaten Deli Serdang**

Nama : Evi Susanti

NPM : 221801039

MENYETUJUI

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

Pembimbing II



Dr. Adam, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 17 Maret 2025

Nama : Evi Susanti

NPM : 221801039



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP
Sekretaris : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP
Penguji Tamu : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , Maret 2025



Evi Susanti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Evi Susanti
NPM : 221801039
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Evi Susanti

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang. Tesis ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Magister.

Proses penyusunan tesis ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area sekaligus
4. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasutgion, MA, selaku Pembimbing I yang selalu banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh sahabat-sahabat saya di kelas A Program Studi Magister Administrasi Publik 2022 Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan, penulis sampaikan tesis hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Medan, Maret 2025
Penulis



Evi Susanti

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN DELI SERDANG

Nama : Evi Susanti
NPM : 221801039
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pasal 2 yang menyebutkan bahwa ruang lingkup informasi pembangunan daerah meliputi data berbasis elektronik/e-Database, perencanaan berbasis elektronik/e-Planning, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/e-Monev, pelaporan berbasis elektronik/e-Reporting. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang (Bappedalitbang) membuat dan memelihara dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bappedalitbang yang bertugas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD), serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dokumen-dokumen tersebut harus diinput dan dikelola dalam SIPD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksanakan berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun tidak seoptimal mungkin karena kurangnya sumber daya manusia dan aplikasi SIPD masih dalam tahap pengembangan. Masalah dalam penyusunan pembangunan daerah memberikan suatu peringatan bahwa pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deli Serdang untuk menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Efektivitas, Aplikasi, Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE REGIONAL DEVELOPMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) APPLICATION AT BAPPEDALITBANG DELI SERDANG DISTRICT

Name : Evi Susanti
NPM : 221801039
Study Program : Master of Public Administration
Adviser I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Adviser II : Dr. Adam, MAP

The Regional Development Information System (SIPD) is an information system used for data and information management, preparation, monitoring and evaluation of regional development plan documents electronically. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 98 of 2018 concerning Regional Development Information Systems Article 2 which states that the scope of regional development information includes electronic-based data/e-Database, electronic-based planning/e-Planning, monitoring and evaluation-based electronic/e-Monev, electronic-based reporting/e-Reporting. The Deli Serdang Regency Regional Development Planning, Research and Development Agency (Bappedalitbang) creates and maintains regional development planning documents, Bappedalitbang is tasked with preparing the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) and Regional Work Plan and Budget (RKAD), as well as monitoring and evaluating their implementation. These documents must be input and managed in SIPD. The research method used in this research is descriptive data analysis with a qualitative approach. The data collection techniques used are interview, observation and documentation methods. The results of this research show that the effectiveness of implementing the Regional Development Information System (SIPD) application at the Deli Serdang Regency Bappedalitbang has been implemented based on applicable laws and regulations, although not as optimal as possible due to a lack of human resources. Problems in preparing regional development provide a warning about the importance of competent human resources in preparing regional development planning in Deli Serdang Regency to become more qualified, effective and efficient in achieving regional development goals, so as to improve community welfare.

Keywords: *Effectiveness, Application, Regional Development Information System*

DAFTAR ISI

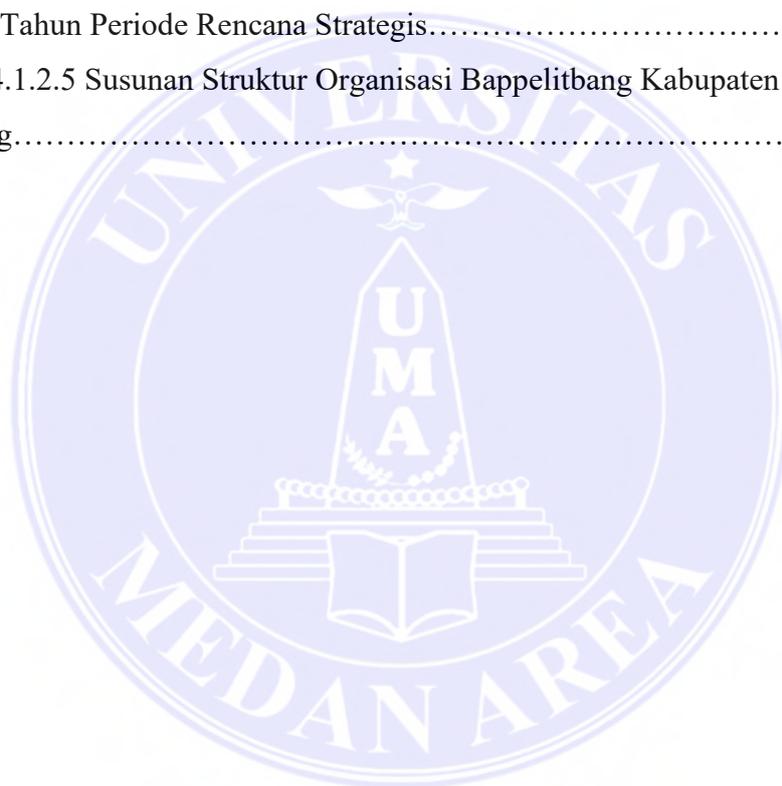
A B S T R A K	Error! Bookmark not defined.
A B S T R A C T	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Efektivitas.....	8
2.1. Pengertian Efektivitas.....	8
2.1.2 Ukuran Efektivitas.....	9
2.1.3 Indikator Efektifitas.....	11
2.2 Konsep Penerapan	13
2.2. Pengertian Penerapan.....	13
2.2.2 Model-Model Penerapan Pelayanan Publik.....	15
2. Konsep Aplikasi.....	25
2.3. Pengertian Aplikasi.....	25
2.3.2 Fungsi Aplikasi Bagi Pemerintah Daerah.....	26
2.3.3 Prosedur Pengelolaan Aplikasi Pada Pemerintah Daerah.....	28
2.4 Konsep Sistem Informasi	31
2.4. Pengertian Sistem Informasi.....	31
2.4.2 Karakteristik Sistem Informasi.....	33
2.4.3 Tujuan Dan Manfaat Sistem Informasi.....	36
2.4.4 Komponen Sistem Informasi.....	39
2.4.5 Sumber Daya Sistem Informasi.....	41

2.5 Konsep Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).....	41
2.5.1 Pengertian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).....	41
2.5.2 Tujuan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).....	44
2.5.3 Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	45
2.6 Konsep Perencanaan Pembangunan.....	46
2.6.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan.....	46
2.6.2 Unsur-Unsur Perencanaan Pembangunan.....	48
2.6.3 Tahapan Perencanaan Pembangunan.....	49
2.6.4 Pengorganisasian Perencanaan Pembangunan.....	51
2.7 Penelitian Terdahulu.....	52
2.8 Kerangka Berpikir.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Pendekatan Penelitian.....	58
3.2 Fokus Penelitian.....	59
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	61
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.5 Teknik Analisa Data.....	65
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1 Profil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dan Dadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Deli Serdang.....	68
4.1.1 Profil Kabupaten Deli Serdang.....	68
4.1.1.1 Sejarah Berdiri Kabupaten Deli Serdang.....	68
4.1.1.2 Keadaan Geografi dan Luas Wilayah.....	71
4.1.1.3 Visi Dan Misi Kabupaten Deli Serdang.....	74
4.1.1.4 Lambang Dan Motto Daerah Kabupate Deli Serdang..	75
4.1.1. Wilayah Administrasi.....	78
4.1.2 Profil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian	

dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Deli Serdang.....	79
4.1.2.1 Visi Dan Misi Bappelitbang Kabupaten Deli Serdang...	79
4.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Bappelitbang Kabupaten Deli Serdang.....	80
4.1.2.3 Kedudukan Bappelitbang Kabupaten Deli Serdang,,...	81
4.1.2.4 Tugas dan Fungsi Bappelitbang Kabupaten Deli Serdang.....	82
4.1.2.5 Susunan Struktur Organisasi Bappelitbang Kabupate Deli Serdang.....	83
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
4.2.1 Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang Dalam Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah.....	85
4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang.....	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel2.1 Kesimpulan Penelitian Terdahulu.....	54
Tabel2.7 Kerangka Berpikir.....	57
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	60
Tabel3.5 Komponen-komponen Analisis Data.....	67
Tabel 4.1.2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat DaerahTahun Periode Rencana Strategis.....	81
Tabel 4.1.2.5 Susunan Struktur Organisasi Bappelitbang Kabupaten Deli Serdang.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar2.4 Sumber Daya Sistem Informasi.....	41
Gambar4.1 Peta Wilayah Kabupaten Deli Serdang.....	73
Gambar 4.2 Luas Daerah menurut Kecamatan (%).....	74
Gambar 4.3 Lambang Kabupaten Deli Serdang.....	75
Gambar 4.4 Wilayah Administratif Berdasarkan Kecamatan.....	78
Gambar 4.2.1.1 Rencana Implementasi Aplikasi SIPD.....	86
Gambar 4.2.1.2 SIPD RI 2024.....	87
Gambar 4.2.2.1 Tampilan Portal Aplikasi SIPD Kabupaten Deli Serdang.....	105
Gambar 4.2.2.2 Tampilan Halaman Login Aplikasi SIPD Kabupaten Deli Serdang.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi bagi suatu masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh. Pembangunan akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya.

Pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh. hal tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Agar perencanaan pembangunan dapat terwujud, maka tidak terlepas dari prinsip-prinsip perencanaan yang baik, adapun prinsip perencanaan yang baik adalah melihat keadaan sekarang, kegagalan masa lampau, potensi, tantangan dan kendala yang ada, kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang, mengikutsertakan dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait, serta mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, demokratis, transparan, realistik, legalistik dan praktis. (Hasibuan 2016:85).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

yang memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan serta melakukan perencanaan pembangunan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan pembangunan nasional, telah dikeluarkan berbagai peraturan pemerintah, yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Beberapa peraturan pemerintah yang penting terkait pengelolaan pembangunan nasional antara lain yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, peraturan ini mengatur tentang sinkronisasi proses perencanaan dan pembangunan nasional, mulai dari tingkat pusat, daerah hingga desa, tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan di semua tingkatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengatur tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional.

Pembangunan daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tidak sekedar pelaksanaan pembangunan semata tetapi lebih maju berfikir dalam penyelenggaraannya melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka menyeragamkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024. Perda ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 termasuk penyesuaian visi, misi, strategi, dan arah pembangunan daerah dengan kondisi terkini. Tujuan dikeluarkannya Perda tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di semua tingkatan, mewujudkan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang yang memuat cita-cita dan arah pembangunan daerah lebih baik yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang salah satu isinya membahas tentang terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang. BAPPEDALITBANG Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Setiap Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam penerapan SIPD yang efektif dan efisien. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang (Bappedalitbang) membuat dan memelihara dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bappedalitbang bertugas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD), serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dokumen-dokumen tersebut harus diinput dan dikelola dalam SIPD. Bappedalitbang berperan sebagai koordinator dalam penerapan SIPD, memastikan semua perangkat daerah memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Bappedalitbang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah dan termasuk masyarakat tentang SIPD dan manfaatnya dalam penyampaian Aspirasi Masyarakat. Dalam hal penyusunan Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Pemanfaatan SIPD sebagai upaya mempermudah proses penyusunan perencanaan Pembangunan daerah yang optimal sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Berdasarkan observasi awal pada BAPPEDALITBANG Kabupaten

Deli Serdang, terdapat permasalahan yang terjadi dalam hal penyusunan Perencanaan pembangunan daerah pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana masih terdapat keterlambatan proses perencanaan dalam penyusunannya serta lambat dalam menyajikan laporan. Hal tersebut diakibatkan karena sumber daya manusia dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Khususnya yang ditugaskan sebagai perencana dinas masih kurangnya kapasitas aparatur di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga perencanaan yang dihasilkan kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan yang berlaku.

Masalah dalam penyusunan pembangunan daerah diatas, memberikan suatu peringatan bahwa pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deli Serdang untuk menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran dan observasi awal di atas, maka penulis tertarik meneliti yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dalam aspek perencanaan pembangunan daerah ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dalam aspek perencanaan pembangunan daerah.
2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan khususnya ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Penyusunan Pembangunan suatu daerah.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan

masukannya kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan kinerja dengan tujuan, ukuran seberapa baik tingkat kinerja, kebijakan, dan prosedur organisasi tercapai. (Beni 2016: 69). Efektivitas juga terkait dengan tingkat keberhasilan operasi sektor publik dan dikatakan bermanfaat ketika kegiatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk memberikan pelayanan publik. Ini adalah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Ketika sebuah organisasi mencapai tujuannya, ia beroperasi secara efektif. Indikator efektivitas menunjukkan efektivitas dan sejauh mana hasil (results) program dalam mencapai tujuan program. Semakin tinggi kontribusi output dari hasil untuk mencapai tujuan atau maksud yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut. (Mardiasmo 2017: 134)

Efektivitas juga merupakan hubungan antara hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun proses tindakan dikatakan efektif dalam

mencapai tujuan kebijakan dan tujuan akhir.(Mahmudi 2010: 143). Dari pendapat di atas jelas bahwa efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena dapat menguraikan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Atau, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dibandingkan dengan aktivasi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektifitas suatu lembaga bukanlah hal yang sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga menyebabkan tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak adalah sebagai berikut; (Sp. Siagian 2008:77)

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para

- implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategis yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
 - d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
 - e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab Apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
 - f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
 - g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
 - h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.1.3 Indikator Efektifitas

Indikator efektifitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektifitas, sebagai berikut: (Makmur 2021:9)

a. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan- satuan biaya merupakan bagian daripada efektifitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran daripada efektifitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya

tebakan, tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur.

e. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktifitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberi perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami, maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktifitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan

keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri

Berdasarkan uraian indikator efektivitas oleh Makmur diatas, intinya dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.2 Konsep Penerapan

2.2.1 Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan. Saat yang sama, menurut pendapat beberapa ahli, penerapan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk kepentingan kelompok atau kelompok tertentu, dan untuk mempraktikkan teori,

metode, atau perilaku tertentu lainnya. Penerapan adalah suatu tindakan dilakukan secara individu atau kolektif dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Secara linguistik, penerapan merupakan semacam hal, metode atau hasil.

Penerapan dapat diartikan sebagai implementasi. Menurut Syahrudin (2019) Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan sehingga kurang berpengaruh. Padahal dalam kenyataan dapat kita lihat sendiri bahwa betapa pun hebatnya suatu rencana program atau kegiatan tetapi apabila itu tidak direalisasikan dengan baik dan benar maka program atau kegiatan itu menjadi sia-sia.

Implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto & Sulisyastuti (2015) impementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk

memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Menurut Mulyadi dalam Chasanah et al. (2017) Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2.2 Model-Model Penerapan Pelayanan Publik

Dalam studi implementasi kebijakan terdapat beberapa mode implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang melihat variabel apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van

Meter & Van Horn, dalam (Agustino, 2020) yang mempengaruhi kinerja implementasi :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengadakan ditingkat pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya,

implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas

Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Ada empat variabel, menurut George C. Edward III, dalam (Agustino, 2020) yang mempengaruhi kinerja implementasi atau penerapan kebijakan :

a. Komunikasi

Keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas,

yaitu :

1. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*streetlevel-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu

nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

4. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Indikator disposisi terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implemenatasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode by passing personil.
3. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

d. Struktur Birokasi

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

1. Membuat Standard Operating Prosedures (SOP) yang lebih fleksibel; SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau elaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-*

to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

2. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Menurut Charles O. Jones (Agustino, 2020) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni :

1. Organisasi: aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi: aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan

sasaran kebijakan. Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

3. Penerapan: aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

2.3 Konsep Aplikasi

2.3.1 Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah sebuah program komputer yang dibuat untuk melakukan suatu tugas atau fungsi tertentu. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Setyawan dan Munari (2020) aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, aplikasi dibuat untuk memudahkan pekerjaan atau tugas – tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data yang dibutuhkan. Aplikasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Aplikasi Sistem yakni aplikasi yang dirancang untuk mengelola dan mengoperasikan sistem komputer. Contoh aplikasi sistem adalah sistem operasi, antivirus, dan firewall.
- b. Aplikasi Perangkat Lunak yang merupakan aplikasi yang dirancang untuk menyelesaikan suatu tugas atau fungsi tertentu. Contoh aplikasi perangkat lunak adalah aplikasi pengolah kata, aplikasi spreadsheet, aplikasi pemutar media, dan aplikasi permainan.

Aplikasi dapat diakses dan digunakan melalui berbagai perangkat, seperti komputer, laptop, tablet, dan smartpone. Aplikasi ini biasanya didistribusikan melalui platform digital, seperti google play store, apple app store, dan microsoft store.

Aplikasi memiliki beberapa karakteristik yakni memiliki fungsi atau tugas yang spesifik dan dirancang untuk melakukan suatu fungsi atau tugas tertentu, mudah digunakan oleh pengguna bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki keahlian komputer yang tinggi, memiliki antarmuka yang menarik dan mudah dinavigasi, efisien dan efektif dalam bekerja dan dapat diandalkan dan tidak mudah mengalami error.

Aplikasi memiliki banyak manfaat antara lain meningkatkan produktivitas pengguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, meningkatkan kualitas hasil dari suatu pekerjaan, memudahkan komunikasi dan kaleborasi antar pengguna, memberikan informasi dan edukasi kepada pengguna, dan memberikan hiburan kepada pengguna.

2.3.2 Fungsi Aplikasi Bagi Pemerintah Daerah

Aplikasi bagi pemerintah daerah memiliki berbagai fungsi penting antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan publik dengan mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti pengurusan izin, pembayaran pajak, dan pelayanan administrasi lainnya., Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui digitalisasi proses dan data., Memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan masukan masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengotomatiskan proses manual yang memakan waktu dan sumber daya, sehingga menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional., Meningkatkan integrasi data antar Dinas dan Instansi di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik., Memantau kinerja program dan kebijakan pemerintah daerah secara real-time untuk meningkatkan efektivitas.
- c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dengan menyediakan informasi dan edukasi penting kepada masyarakat terkait berbagai program dan layanan pemerintah daerah., Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan program pemerintah daerah., Memberikan akses kepada layanan publik yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

- d. Meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan dan penerapan sistem pembayaran yang lebih transparan dan akuntabel., Membuka peluang usaha baru dan meningkatkan daya saing daerah melalui platform digital., dan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- e. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui digitalisasi proses dan data., Memfasilitasi monitoring dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah., Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar dinas dan instansi di lingkungan pemerintah daerah.

Contoh Penerapan Aplikasi di Pemerintah Daerah yakni :

- a. Aplikasi pengurusan izin yang mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha, izin bangunan, dan izin lainnya secara online.
- b. Aplikasi pembayaran pajak yang memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak daerah secara online melalui berbagai platform pembayaran.
- c. Aplikasi layanan kesehatan dengan memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan, layanan konsultasi dokter online, dan pemesanan obat-obatan.
- d. Aplikasi pendidikan dengan menyediakan akses kepada materi pembelajaran online, platform belajar mengajar online, dan

penilaian prestasi siswa.

- e. Aplikasi pariwisata dengan menyediakan informasi tentang destinasi wisata, akomodasi, transportasi, dan berbagai layanan wisata lainnya.

Penerapan aplikasi yang tepat dan efektif dapat memberikan banyak manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya.

2.3.3 Prosedur Pengelolaan Aplikasi Pada Pemerintah Daerah

Prosedur pengelolaan aplikasi pada pemerintah daerah umumnya mengikuti siklus tahapan yang terstruktur dan sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Prosedur pengelolaan aplikasi pada pemerintah daerah harus dilakukan dengan baik dan benar agar aplikasi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat, sebagai catatan bahwa prosedur pengelolaan aplikasi dapat berbeda-beda di setiap pemerintah daerah, tergantung pada kebijakan dan kondisi masing-masing daerah. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam prosedur pengelolaan aplikasi pada pemerintah daerah :

- a. Perencanaan

1. Tahap identifikasi, pada tahap ini pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan

atau dibeli, kebutuhan ini harus berdasarkan pada permasalahan yang ada di lapangan, dan harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah.

2. Tahap analisis kelayakan, pada tahap ini dilakukan analisis kelayakan untuk memastikan bahwa aplikasi yang akan dikembangkan atau dibeli sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan sumber daya yang tersedia.
3. Tahap penyusunan rencana, pada tahap ini disusun rencana pengelolaan aplikasi yang meliputi rencana pengembangan, pengadaan, implementasi, operasi, pemeliharaan, dan evaluasi. Rencana ini harus terukur, realistis, dan dapat dicapai.

b. Pengembangan atau Pengadaan

1. Tahap pengembangan, pada tahap ini dilakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan rencana yang telah disusun, pengembangan ini harus dilakukan dengan metodologi yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak terkait.
2. Tahap pengadaan, jika aplikasi dibeli pihak ketiga, pada tahap ini dilakukan pengadaan aplikasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, pengadaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan efisien

c. Implementasi

1. Tahap uji coba, pada tahap ini dilakukan uji coba aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik dan sesuai

dengan kebutuhan, uji coba ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait.

2. Tahap pelatihan, pada tahap ini dilakukan pelatihan kepada pengguna aplikasi agar mereka dapat menggunakan aplikasi dengan baik dan benar, pelatihan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien.

3. Tahap implementasi, pada tahap ini aplikasi di implementasikan secara resmi kepada pengguna, implementasi ini harus dilakukan secara bertahap dan terkendali agar tidak mengganggu operasional normal.

d. Operasi dan Pemeliharaan

1. Tahap operasi, pada tahap ini aplikasi dioperasikan dan dipelihara secara berkala, operasi ini harus dilakukan sesuai dengan standar operational procedure (SOP) yang telah ditetapkan, pemeliharaan ini harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa aplikasi tetap berfungsi dengan baik.

2. Tahap dukungan pengguna, pada tahap ini disediakan layanan dukungan pengguna untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi saat menggunakan aplikasi, layanan ini dapat berupa call center email, atau website.

e. Evaluasi

1. Tahap evaluasi kinerja, pada tahap ini dilakukan evaluasi kinerja

aplikasi untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi aplikasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak terkait.

2. Tahap evaluasi kepuasan pengguna, pada tahap ini dilakukan evaluasi kepuasan pengguna terhadap aplikasi, evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak terkait.
3. Tahap perbaikan, berdasarkan hasil evaluasi dilakukan perbaikan terhadap aplikasi agar aplikasi dapat berfungsi lebih baik dan memuaskan pengguna, perbaikan ini harus dilakukan secara berkala dan terkendali.

2.4 Konsep Sistem Informasi

2.4.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3), merupakan “suatu rangkaian yang terdiri beberapa komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dibagi ke dalam subsistem yang lebih kecil untuk mendukung sistem yang lebih besar”. Sehingga dapat diartikan bahwa Sistem Informasi dalam suatu lembaga merupakan kombinasi antara manusia dan teknologi yang mengerjakan suatu proses informasi.

Sistem informasi menurut Gordon B. Davis dalam (Alfani & Nasution, 2022) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan

mengeluarkan hasilnya. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi.

Menurut John F. Nash dan Martin B. Roberts dalam (Fauzi, 2017) Suatu sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan sesuatu dasar untuk pengambilan keputusan.

Menurut (Alfani & Nasution, 2022) Sistem Informasi Kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen adalah pengertian dari Sistem Informasi. Istilah sistem informasi dalam arti luas sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu,

dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (garbage).

Sistem Informasi menggunakan perangkat elektronik berupa perangkat keras, basis data, perangkat lunak, prosedur, model analisis dan proses administratif pengambilan keputusan yang dikemas menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna sistem tersebut (Almazan, dkk, 2017). Pengelolaan kegiatan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, sedangkan hasilnya digunakan sebagai tujuan tertentu dalam kegiatan suatu lembaga.

2.4.2 Karakteristik Sistem Informasi

Karakteristik suatu sistem informasi memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu, yakni memiliki komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, input, pengolah, output, tujuan, dan sasaran. (Hartono 2014 :53)

a. Komponen sistem

Sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen yang berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan satu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa subsistem yang memiliki sifat-sifat sistem untuk mengerjakan perintah tertentu dan berpengaruh terhadap sistem secara keseluruhan.

b. Batas Sistem

Batas sistem adalah area yang memisahkan suatu sistem dari sistem lain di sekitarnya. Batas sistem memungkinkan sistem dilihat sebagai satu kesatuan dan menunjukkan cakupan sistem tersebut.

c. Lingkungan Sistem

Lingkungan sistem adalah segala sesuatu di luar batas sistem yang berpengaruh terhadap operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat memberikan manfaat (energi bagi sistem dan harus dijaga) atau dapat merugikan (harus dikendalikan dan ditahan).

d. Penghubung Sistem

Penghubung sistem berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara subsistem-subsistem yang ada. Fungsinya adalah untuk memfasilitasi aliran sumber daya dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Dalam hal ini, keluaran dari sebuah subsistem dapat menjadi masukan bagi subsistem lain melalui penghubung. Melalui penghubung, subsistem dapat berinteraksi dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah kesatuan yang terintegrasi.

e. Masukan Sistem

Masukan sistem merujuk pada energi yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Ada dua jenis masukan sistem, yaitu masukan perawatan dan masukan sinyal. Masukan perawatan berfungsi sebagai sumber daya untuk menjaga sistem agar tetap dapat beroperasi dengan baik. Sedangkan, masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk menghasilkan keluaran yang berguna.

f. Keluaran Sistem

Keluaran sistem adalah hasil dari pengolahan energi yang masuk ke dalam sistem. Keluaran ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran yang berguna dapat menjadi masukan bagi subsistem lainnya atau bagi super sistem.

g. Pengolah Sistem

Pengolah sistem adalah bagian dari sistem yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Pengolah sistem ini dapat memiliki berbagai macam jenis dan bentuk, tergantung pada jenis sistem yang sedang dioperasikan.

h. Sasaran Sistem

Sasaran sistem adalah tujuan atau objektif yang ingin dicapai oleh sebuah sistem. Tanpa adanya sasaran atau tujuan, sistem tidak akan memiliki nilai dan manfaat yang jelas. Keberhasilan sebuah sistem diukur berdasarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mencapai sasarnya atau tujuannya.

Setiap elemen memerlukan informasi yang berbeda sesuai kebutuhannya. Manajemen terdiri dari serangkaian proses yang dilakukan oleh pengelola perusahaan, seperti merencanakan (membuat strategi, menetapkan tujuan, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan), memprakarsai, mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan mengendalikan operasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, sistem informasi merupakan sebuah sistem informasi yang menghasilkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan melalui berbagai proses yang dibutuhkan untuk mencapai target tertentu dalam kegiatan organisasi.

2.4.3 Tujuan Dan Manfaat Sistem Informasi

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi yang berguna bagi para penggunanya. Informasi sendiri merupakan data yang telah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pengguna. Agar informasi dapat bermanfaat, maka informasi tersebut haruslah tepat sasaran atau relevan dengan kebutuhan pengguna, tepat waktu, dan akurat atau tepat nilainya.

Oleh karena itu, informasi yang tidak terdapat satu dari tiga kriteria tersebut tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat. (Purnama, 2016:32) Sebagai sistem informasi, hasil yang dihasilkan haruslah berupa informasi yang memenuhi ketiga kriteria tersebut yaitu relevan, tepat waktu, dan akurat. Faktor-faktor yang menentukan kehandalan dari suatu sistem informasi dapat dikatakan baik bila terdapat kriteria-kriteria berikut : (Hartono, 2004: 20)

- a. Keunggulan (*usefulness*), Sistem yang unggul harus memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi.
- b. Kehandalan (*Reliability*), sistem harus menghasilkan keluaran yang

- akurat dengan tingkat ketelitian tinggi dan beroperasi secara efektif.
- c. Ekonomis (*Economic*), sistem harus memberikan manfaat minimal yang setara dengan biayanya.
 - d. Sederhana dalam kemudahan (*Simplicity*), sistem harus sederhana dan mudah dipahami sehingga struktur dan operasinya dapat dipahami dengan mudah dan prosedur mudah digunakan.
 - e. Fleksibel (*Fleksibility*) sistem informasi harus dapat dipakai disetiap kondisi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - f. Pelayanan (*Customer Service*), sistem harus menyediakan layanan yang efektif dan efisien kepada pengguna ketika berinteraksi dengan organisasi.
 - g. Kapasitas (*Capacity*), setiap sistem harus memiliki kapasitas yang sesuai untuk menangani volume yang diperlukan pada setiap periode.

Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai target sangat bergantung pada keahlian pelaksana yang mengelolanya. Manajemen merupakan suatu metode yang mengatur dan mengelola organisasi yang dapat diartikan sebagai seni dalam melaksanakan tugas melalui seseorang. Jika manajemen suatu organisasi berjalan dengan baik, maka akan menunjang kesejahteraan organisasi.

Oleh karena itu, Sistem Informasi dibentuk untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, baik

keputusan rutin maupun keputusan strategis. Sistem informasi menjadi sistem yang memberi pengelola organisasi dengan data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi (Vellya Asril Imami, 2021: 10).

Berikut manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penunjang aksesibilitas data yang diberikan secara tepat dan akurat bagi para pengguna, tanpa mewajibkan adanya perantara sistem informasi.
- b. Penjaminan ketersediaan kualitas dan kemampuan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- c. Pengidentifikasian keperluan-keperluan akan kemampuan pendukung sistem informasi.
- d. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
- e. Penetapan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
- f. Perbaikan produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- g. Mengantisipasi dan memahami dampak ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.

2.4.4 Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi terdiri dari lima sumber daya yang dikenal sebagai komponen sistem informasi. Kelima sumber daya tersebut adalah manusia, hardware, software, data, dan jaringan. Kelima

komponen tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam suatu sistem informasi. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua sistem informasi mencakup kelima komponen tersebut. Misalnya, sistem informasi pribadi yang tidak mencakup jaringan telekomunikasi (Mulyanto, 2009).

- a. Sumber Daya Manusia. Manusia mengambil peranan yang penting bagi sistem informasi. Manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem informasi. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengguna akhir (*end user*) dan pakar sistem informasi. Pengguna akhir (*end user*) adalah orang-orang yang menggunakan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi, misalnya pelanggan, pemasok, teknisi, mahasiswa, dosen, dan orang-orang yang berkepentingan dengan informasi dari sistem informasi tersebut. Sedangkan pakar sistem informasi adalah orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi, misalnya sistem analis, developer, operator sistem, dan staf administrasi lainnya.
- b. Sumber Daya Hardware. Sumber daya hardware adalah semua peralatan yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Sumber daya hardware tidak hanya sebatas komputer saja, melainkan semua media data seperti lembaran kertas dan disk magnetik atau optikal.
- c. Sumber Daya Software. Sumber daya software adalah semua rangkaian perintah (instruksi) yang digunakan untuk memproses

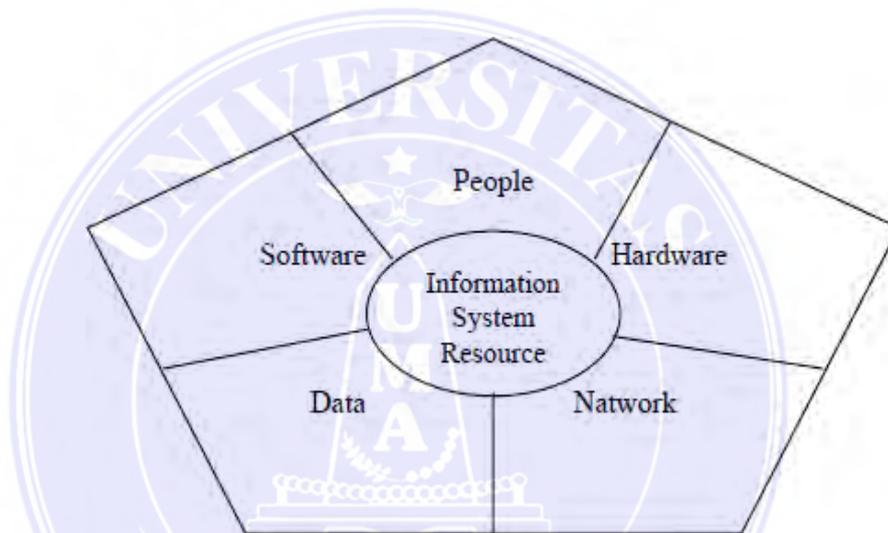
informasi. Sumber daya software tidak hanya berupa program saja, tetapi juga berupa prosedur. Program merupakan sekumpulan instruksi untuk memproses informasi. Sedangkan prosedur adalah sekumpulan aturan yang digunakan untuk mewujudkan pemrosesan informasi dan mengoperasikan perintah bagi orang-orang yang akan menggunakan informasi.

- d. Sumber Daya Data. Sumber daya data bukan hanya sekedar bahan baku untuk masukan sebuah sistem informasi, melainkan sebagai dasar membentuk sumber daya organisasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya data dapat berbentuk teks, gambar, audio, maupun video.
- e. Sumber Daya Jaringan Sumber daya jaringan merupakan media komunikasi yang menghubungkan komputer, pemroses komunikasi, dan peralatan lainnya, serta dikendalikan melalui software.

Komponen-komponen tersebut sangat penting dalam suatu sistem informasi, apabila salah satu komponen tidak ada maka sistem informasi tidak akan berjalan. Penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi atau sektor pemerintahan dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik agar suatu pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien.

2.4.5 Sumber Daya Sistem Informasi

Sebuah sistem informasi terdiri dari sumber daya manusia (*end user dan IS specialist*), perangkat keras (mesin dan media), perangkat lunak (program dan prosedur), data (data dan pengetahuan), dan jaringan (media komunikasi dan dukungan jaringan) untuk membentuk input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kegiatan pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi.



Gambar 2.4 Sumber Daya Sistem Informasi (O'Brein, 2001)

2.5 Konsep Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

2.5.1 Pengertian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Permendagri No 8 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan kata lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaannya dibuatlah aplikasi berbasis web yang dinamakan aplikasi SIPD.

Tahun 2020 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diluncurkan sebagai sebuah sistem berbasis online dan terdiri dari sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan dan pengawasan daerah lainnya. SIPD memberikan gambaran umum tentang daerah di seluruh Indonesia dan merupakan bagian dari upaya *egovernment* dalam meningkatkan kinerja pemerintah dengan masyarakat lainnya menuju *Good governance*.

SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, seluruh daerah di wilayah Indonesia harus menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi dalam hal ini

adalah aplikasi SIPD (Ekaputra, 2021).

Pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dapat menggunakan SIPD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, cepat dan inovatif. Sistem ini menyajikan data pembangunan masing-masing daerah secara interaktif dan dilengkapi dengan analisisnya. Tampilan visual SIPD memudahkan pengguna untuk memahami data yang ditampilkan tanpa perlu membaca teks atau tabel yang monoton. Data dan informasi pembangunan daerah sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Dalam SIPD terdapat empat komponen yang terdapat dalam sistem informasi pemerintahan daerah, di antaranya:

- a. Data berbasis elektronik/ e-Database;
- b. Perencanaan berbasis elektronik/ e-Planning;
- c. Monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/ e-Monev; dan
- d. Pelaporan berbasis elektronik/ e-Reporting.

SIPD memegang peran penting dalam mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang mutakhir, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, SIPD juga berperan dalam mendorong sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk mencapai single database nasional. Oleh karena itu, penggunaan SIPD harus dioptimalkan untuk mendukung tercapainya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang efektif dan efisien (Winarno, Kusnadi, & Afriliana, 2019).

2.5.2 Tujuan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Menurut Pesak et al. (2021) SIPD memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.
- b. Mempermudah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Data dan informasi pendukung dalam penyusunan pembangunan daerah arah dan kebijakan.
- d. Mendukung penetapan prioritas masalah di daerah.
- e. Meningkatkan kualitas produk kebijakan publik.
- f. Memajukan potensi ekonomi daerah.

Menurut Amanah (2018) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan menggunakan teknologi informasi. SIPD memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, baik di Daerah maupun di Pusat;
- b. Memudahkan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

- c. Mendukung Data dan Informasi dalam Penyusunan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- d. Mendukung Penetapan Prioritas Permasalahan di Daerah;
- e. Meningkatkan Kualitas Produk-produk Kebijakan Publik,
- f. Mempromosikan Potensi Ekonomi Daerah

Menurut Inzany (2022) Penerapan aplikasi berbentuk website ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun pada pelaksanaannya untuk dapat mengimplementasikan aplikasi ini pada Pemerintahan Daerah tidak mudah, maka perlu adanya kerjasama antar instansi, penguatan regulasi, serta waktu untuk dapat diimplementasikan dengan seragam bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Mengingat program pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini termasuk proyek strategis untuk pertahanan Nirmiliter Negara.

2.5.3 Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

- a. Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat;
- b. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan informasi;
- c. Membangun database Provinsi, Kabupaten/Kota yang

- menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah;
- d. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat

2.6 Konsep Perencanaan Pembangunan

2.6.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perubahan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai kondisi yang lebih baik berdasarkan aturan-aturan tertentu. Segala bentuk pembangunan tak terlepas dari pembangunan. Perencanaan dalam arti luas menurut Tjokroamidjojo yaitu proses menyiapkan secara sistematis segala kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Maramis, Nayoan, & Waworundeng, 2021).

Perencanaan merupakan sebuah sistem bagaimana caranya untuk mencapai tujuan akhir yang semaksimal mungkin melalui sumber yang sudah tersedia agar lebih efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan, dengan berbagai unsur stakeholder yang terlibat, dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia dalam periode tertentu. Sehingga dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu instruksi penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya dalam mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan respons kepekaan terhadap masa depan. Hubungan antara perencanaan dan pembangunan memiliki kompleksitas yang tinggi. Kompleksitas ini dapat dilihat dari beberapa teori perencanaan seperti teori perencanaan rasional komprehensif, incremental, advokasi, radikal, dan transaktif. Di sisi lain, kompleksitas pembangunan dapat diketahui melalui arti pembangunan yang semakin meluas serta pergeseran paradigma pembangunan yang meliputi paradigma modernisasi, dependensi, ekologi, kebutuhan dasar, pembebasan, dan endogen.

Para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai perencanaan pembangunan yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai pengarah penggunaan sumber daya pembangunan yang terbatas agar dapat mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien (Islamiyah, Fakhsiannor, & Herman, 2021).

Secara prinsip, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang dibuat dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang selalu menjadi proses yang tidak berakhir. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah dapat ditemukan pada Pasal 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu “Untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat, mengembangkan

peluang usaha, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik dan daya saing daerah”.

Tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yakni:

- a. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait dalam pembangunan.
- b. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

2.6.2 Unsur-Unsur Perencanaan Pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah perlu mempunyai perencanaan yang matang dan mantap agar pembangunan dapat berguna dan berhasil. Menurut (Anggara & Sumantri, 2016) dalam perencanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Mengetahui lokus. mengetahui dan memahami kondisi umum daerah yang menjadi target pembangunan.
- b. Mempunyai visi dan misi pembangunan. untuk apa, siapa, dan

mengapa pembangunan itu perlu dilakukan.

- c. Adanya prioritas pembangunan. untuk mewujudkan pengoptimalan terhadap pencapaian target pembangunan dengan anggaran dan sumber daya yang terbatas.
- d. Mempunyai strategi pembangunan. bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara teratur dan mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, yang tepat dan terarah.
- e. Mempunyai target pembangunan. tindakan nyata yang akan dilaksanakan dan periode yang dibutuhkan dari tujuan yang akan dicapai.

2.6.3 Tahapan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dari proses Perencanaan Pembangunan yang meliputi:

- a. Penyusunan rencana;

Langkah pertama dalam penyusunan rencana adalah membuat rancangan rencana pembangunan yang lengkap. Setiap instansi pemerintah kemudian mempersiapkan rancangan rencana kerja sesuai dengan rancangan rencana pembangunan yang sudah disiapkan dengan melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh setiap tingkat pemerintahan melalui kegiatan musyawarah serta menyusun rancangan akhir rencana pembangunan.

b. Penetapan rencana;

Setelah rencana disusun, tahap selanjutnya adalah penetapan rencana yang akan menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak untuk melakukannya. Menurut Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang Nasional maupun Daerah ditetapkan menjadi Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden/Kepala Daerah, serta rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

c. Pengendalian pelaksanaan rencana;

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin terwujudnya tujuan dan target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam rencana. Pengendalian ini melibatkan kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD.

d. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mengukur pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tertulis dalam dokumen rencana pembangunan.

2.6.4 Pengorganisasian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan memerlukan koordinasi dan pengorganisasian dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai sumberdaya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

a. Tahap-tahap pengorganisasian Perencanaan Pembangunan

Menurut Syarifudin (dalam Najib, 2011:34) langkah-langkah utama dalam proses pengorganisasian perencanaan pembangunan adalah:

1. Memperoleh data dan informasi mengenai daerah dan penduduk.
2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada di daerah.
3. Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.
4. Merumuskan pola dasar pembangunan daerah untuk memenuhi tujuan jangka panjang.
5. Merumuskan beberapa pilihan strategis rencana pembangunan daerah jangka panjang.

6. Mengikuti pilihan strategis dan memilih/menetapkan strategi optimum.
7. Merumuskan rencana dan anggaran tahunan.
8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan atas rencana dan anggaran tahunan.
9. Melaksanakan rencana/program tahunan.
10. Melakukan pemantauan.
11. Melakukan evaluasi.
12. Memperoleh dan menyediakan umpan balik.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Penelitian pertama berjudul “Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang” ditulis oleh Reni Kesuma Putri dari Ilmu

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa sangat memudahkan para pemangku kebijakan untuk merumuskan, memilah dan menyusun hasil musrenbang.

Penelitian kedua berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” di tulis oleh Muh. Nur Hidayat dari Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah efektif dan efisien, karena sangat membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti, kualitas dan kuantitas SDM pengelola SIPD, sistem yang terkadang bermasalah, serta jaringan telekomunikasi yang sering tidak stabil. Upaya yang dilakukan adalah terus melakukan bimbingan dan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPD, mengoptimalkan jaringan, serta selalu aktif dan gerak cepat dalam berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ketika terjadi masalah dalam sistem ini.

Penelitian ketiga berjudul “Implementasi Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang)” di tulis oleh Rizki Nanda Pratama dari Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIPD yang di terapkan BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Hal tersebut diukur melalui proses penyusunan dokumen perencanaan, empat indikator perencanaan pembangunan yang berkualitas dari BAPPEDA, serta empat faktor yang mempengaruhi implementasi dari teori Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Meskipun begitu, terdapat faktor penghambat dalam mengimplementasikan SIPD yaitu sumber daya manusia yang kurang berkompeten, informasi tentang kepatuhan pelaksana yang kurang lengkap, serta fasilitas mengenai jaringan yang kurang stabil

Tabel 2.1 Kesimpulan Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Analisis		
		Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang	Membahas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Penelitian ini mengkaji pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa	Melihat efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang dan menemukan kendala pelaksanaannya.
2	Efektivitas Penerapan	Membahas Sistem	Penelitian ini	Melihat efektivitas

	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	mengkaji penggunaan SIPD dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang dan menemukan kendala pelaksanaannya
3	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulung Bawang)	Membahas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan SIPD yang di terapkan BAPPEDA Kabupaten Tulung Bawang menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.	Melihat efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang dan menemukan kendala pelaksanaannya

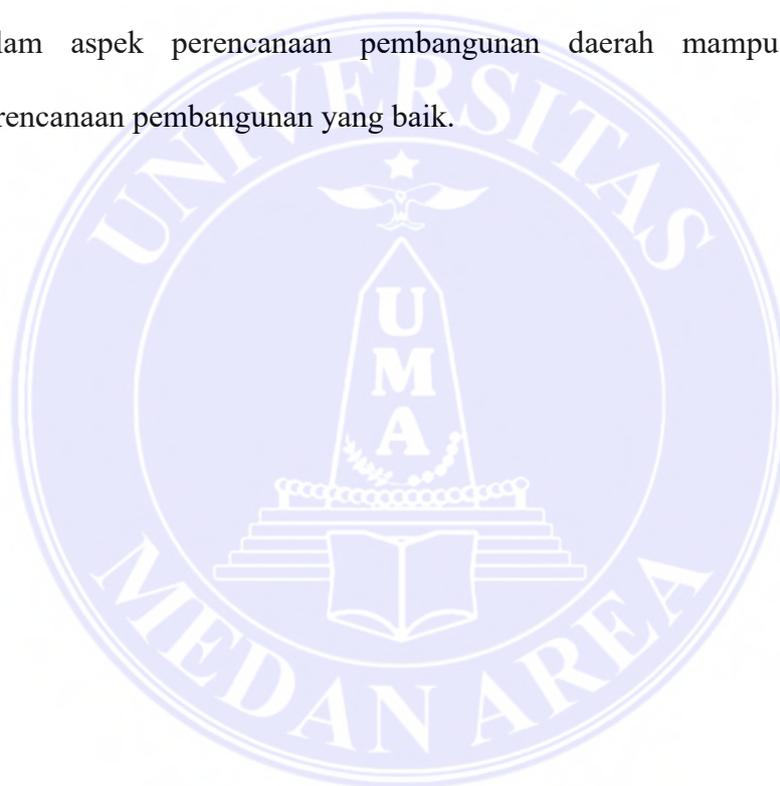
2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menghubungkan antara teori dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Manfaat dari kerangka berpikir yaitu membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah, membantu memilih serta menemukan model yang cocok dalam penelitian.

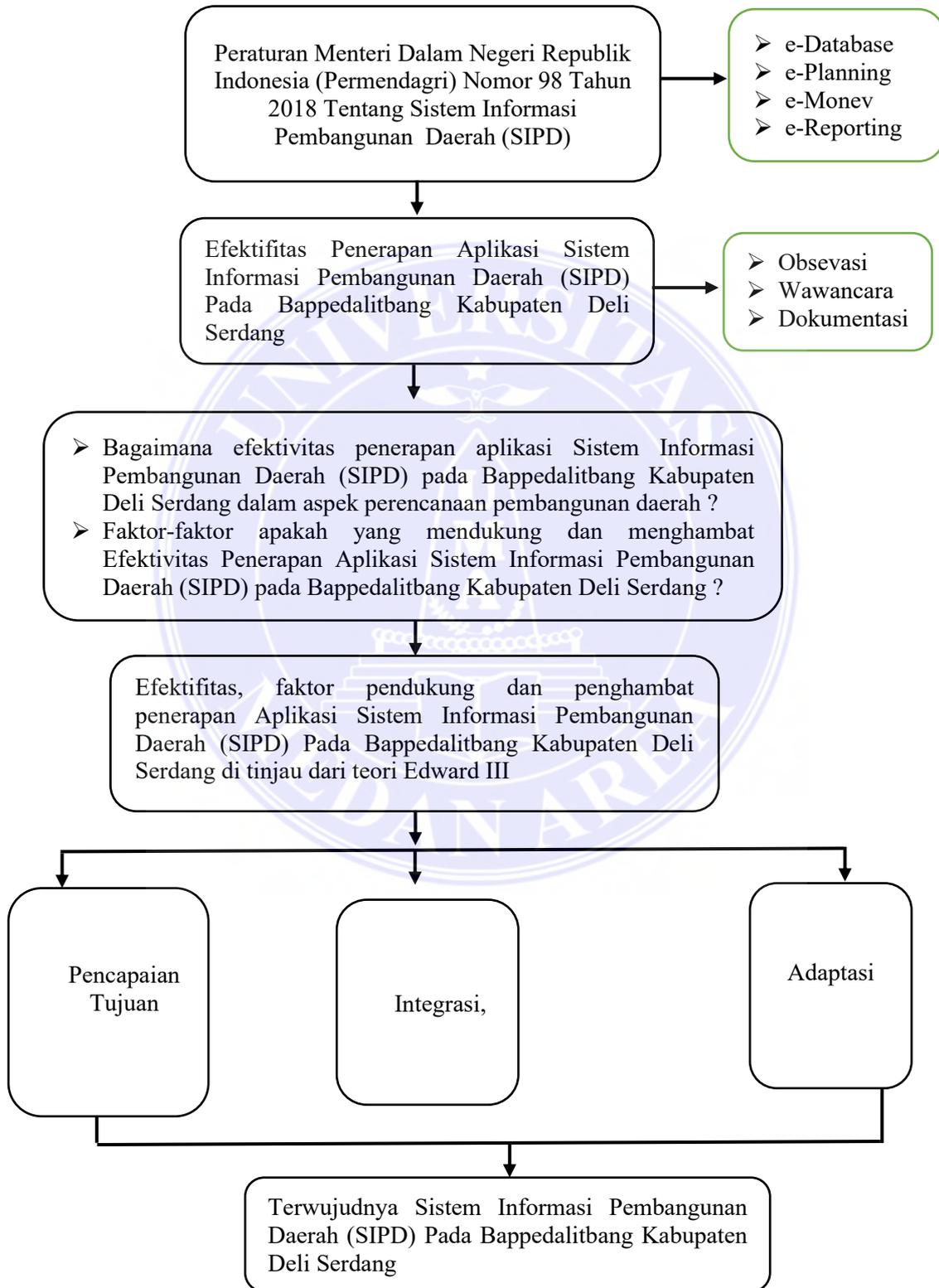
Menurut Sugiyono (2008:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang telah di deskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sementara, Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2008:65) mengemukakan bahwa: “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang

penting.”

Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Sehingga dapat diketahui apakah efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dalam aspek perencanaan pembangunan daerah mampu menciptakan perencanaan pembangunan yang baik.



Tabel 2.7 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. (Iman Gunawan:2016).

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya (orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai) sangat beragam. Kondisi ini memang disengaja oleh periset karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang

sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset eksploratori. (Istijanto:2005)

Menurut David Williams dalam buku Andi Prastowo mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.(Andi Prastowo:2014)

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy J. Moleong:2015).

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. (V.Wiratna Sujarweni:2015).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pusat perhatian dari apa yang akan diteliti guna mendapatkan data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang ditetapkan. Penetapan fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian karena dapat mencegah terjadinya pembiasaan dalam mempersiapkan dan membahas masalah yang diteliti.

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek

penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

(Sugiyono 2017;207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dalam aspek perencanaan pembangunan daerah.
- b. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang.

Untuk menjawab fokus penelitian diatas, peneliti memilih informan yang didasarkan atas subjek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data sehingga fokus penelitian bisa terjawab. Adapun informan yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Informan Penelitian

No	Informan	Nama Informan	Jumlah
1	Informan Kunci	Kabid Perencanaan	1

2	Informan Utama	Admin Aplikasi SIPD	2
3	Informan Tambahan	Kasubag Perencanaan	1

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Lokasi dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai lokasi penelitian. Kemudian situs penelitian berada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Deli Serdang yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah yang juga bertindak sebagai unit kerja perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan keterangan yang lengkap maka harus digunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan jenis data yang digunakan maka pengumpulan data dilakukan dengan tehnik interaktif melalui proses wawancara dan tehnik non interaktif yang dilakukan dengan mencatat dokumen/arsip

1. Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang

bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2002: 113). Sedangkan Mulyana (2002: 180) mengatakan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini ditempuh karena sejumlah informan yang representative ditanyai dengan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. (Moleong, 2001).

Sedangkan metode wawancara tak berstruktur/terbuka, menurut Mulyana (2002: 181) bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Ada 3 (tiga) karakteristik wawancara tak berstruktur/terbuka yaitu :

- a. Memungkinkan informan menggunakan cara-cara untuk mendefinisikan pendapatnya.
- b. mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetapi pertanyaan yang sesuai untuk semua responden/informan
- c. memungkinkan informan membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal (Denzin dalam Mulyana, 2002: 182)

Senada dengan Denzin, Nasution (2002: 119) juga mengatakan bahwa wawancara terbuka memungkinkan informan spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian pewawancara memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah itu, karena setiap informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikiran masing-masing dan dengan demikian dapat memperkaya pandangan peneliti. Dipilihnya metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk:

- a. Memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya bagaimana efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang dengan Memperoleh informasi dengan cepat dan langsung dari informan;
- b. Memperoleh jawaban yang valid berdasarkan mimik, emosi informan saat memberikan informasi/pendapat
- c. Memperoleh jawaban yang akurat karena apabila ada salah penafsiran dari informan, peneliti dapat langsung memperbaiki/meluruskan pertanyaan yang dimaksud oleh peneliti.

2. Ovservasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2003: 30). Data yang didapat melalui berupa kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi

interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan yang dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan dilakukannya wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui Efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) tersebut dilakukan untuk memberi gambaran secara keseluruhan, dan mengenai perilaku atau ekspresi yang terjadi pada saat suatu pertanyaan tertentu ditanyakan, dan bahkan untuk menyatakan gaya narasumber dalam menanggapi pertanyaan tersebut.

3. Telaah Dokumen

Telaah dokumen teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mempelajari buku-buku, yang berkaitan dengan efektivitas penerapan aplikasi SIPD. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data yang telah terkumpul dari beberapa teknik penggalan data sebelumnya.

4. Validitas Data

Ketepatan dan kemandapan data tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulan data. Data yang berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat, perlu diuji dengan pengembangan dengan melakukan validitas data agar membuktikan apakah sesuatu yang diamati sesuai dengan yang senyatanya.

Validitas data merupakan jaminan bagi kemandapan simpulan dan

tafsir makna sebagai hasil penelitian (H.B.Sutopo, 2002: 78). Untuk menguji kebenaran dari hasil yang diperoleh maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data. Menurut H.B.Sutopo (2002:79) “Triangulasi data atau sumber memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis.

Triangulasi data digunakan untuk mengarahkan peneliti agar mengumpulkan data dari beragam sumber data yang berbeda untuk menggali data sejenis sehingga apa yang diperoleh dari sumber data yang satu dapat lebih teruji kebenarannya bila digali dari sumber data yang berbeda. Yang penekanannya pada perbedaan sumber data, bukan pada teknik pengumpulan data atau yang lain. Cara ini digunakan untuk mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang sama/sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber yang berbeda.

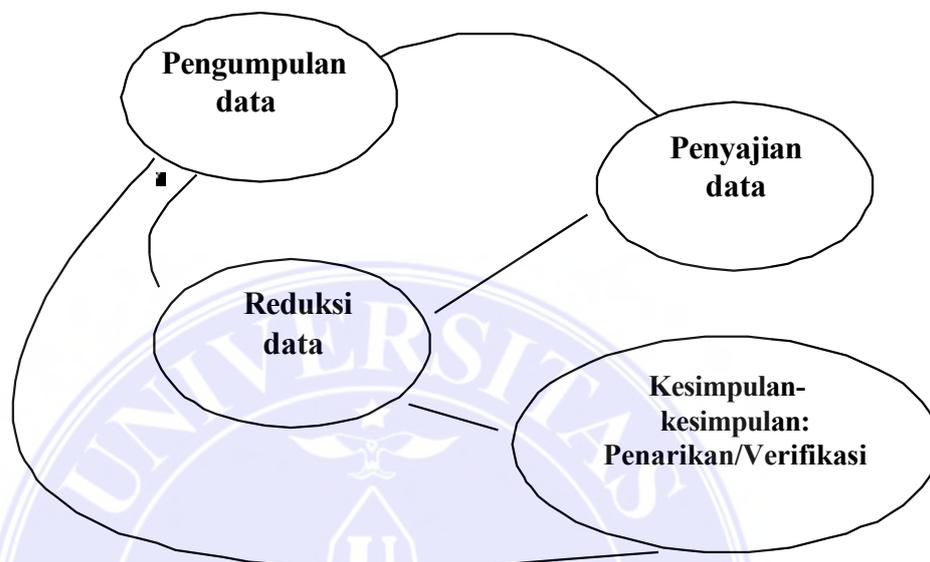
Triangulasi data digunakan dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan telaah arsip, dokumen, dan artikel dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini triangulasi metode dilakukan melalui metode wawancara dengan berbagai informan baik dari pihak kantor maupun masyarakat, observasi, dan telaah arsip, dokumen, dan artikel dari berbagai sumber untuk memperoleh data yang valid.

3.5 Teknik Analisa Data

Untuk memberi pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskriptif. Sebagaimana dikatakan Arikunto (1998: 194), penelitian yang menjawab problematika serta ingin mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, lebih tepat digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dipilihnya teknik analisis deskriptif kualitatif karena permasalahan atau sasaran penelitian adalah Efektivitas Penarapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Kabupaten Deli Serdang. Penelitian akan melibatkan pencarian data dari pihak-pihak terkait. Langkah yang ditempuh dengan mengorganisir data berupa gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel atau buku-buku pedoman dan sebagainya (Moleong, 2001: 103).

Data juga diperoleh dari internet atau surat kabar berkaitan dengan masalah. Selanjutnya dianalisis dengan model siklus interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Proses ini dilakukan selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Komponen analisis data (model interaktif) dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.5

Komponen-komponen Analisa Data

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dalam aspek perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan berdasarkan regulasi dan cukup efektif dan diukur dalam aspek pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, sebagaimana dalam teori Duncan dalam Steers.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang yakni: Faktor pendukung meliputi Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Bappedalitbang, dan Sumber daya manusia dan sarana prasarana Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang yang cukup memadai serta sosialisasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang masih belum optimal dan aplikasi SIPD masih dalam tahap pengembangan.

1.2 Saran

1. Untuk mengoptimalkan efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang harus lebih berusaha mengoptimalkan sumber daya manusia (pegawai, staf) dengan cara memberikan edukasi atau pemahaman yang baik supaya efektivitas kerja lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap pada regulasi hukum yang berlaku.
2. Untuk meminimalisir faktor penghambat penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang harus mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang, selain itu meningkatkan sumber daya manusia pendukungnya agar dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak mengalami hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Alfa Beta.
- Amanah, N. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang. 1–54.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian*,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014),
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Admnistrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Pustaka Setia,
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>
- Dunn, William. 2003. *Analisis KebijakanPublik*. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Pers
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk Nanda.
- Fauzi, R. A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Cv Budi Utama.
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik Ed.1 Cet.4*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016)
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwanto, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. 2(10), 3573–3588.
- Istijanto,*Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2005
- Kartono, D., & Nurcholis, H. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan. Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4542/M.
- Lexy J. Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ramaja Rosda Karya,2005),

- Moloeng., L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nursini. (2010). *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah, Teori dan Aplikasi*.
- Pesak, P. J., Maradesa, N. C., Eyne, A., Gazali, A., & Salindeho, A. (2021). Analysis of Local Government Information System (SIPD) Implementation at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bitung City Government
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*.
- Purnama, C. (2016). *Sistem Informasi Manajemen. Jurnal Sistem Informasi (Vol. 2)*.
- Purwanto, E. A., & Sulisyastuti, D. R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia. Gava Media.
- Reni Kesuma, P, 2021. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Skripsi Unpublished.
- Silmi, Sikka Mutiara. 2008. *Panduan Menulis Surat Lengkap*. Yogyakarta: Absolut
- Sinulingga, Sukaria (2015), *Metode Penelitian*, Edisi Ketiga, USU Press, Medan
- Steers, Richard M.2012. Efektivitas Organisasi. Jakarta. Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukoco, Badri Munir. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Erlangga
- Syahrudin. (2019). Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Studi Kasus. Nusa Media.
- V.Wiratna Sujarweni, (2015), *Metodologi Penelitian– Bisnis dan Ekonomi*,

(Yogyakarta:Pustaka Baru Press,

B. Jurnal

Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 Nomor 1, 4036–4043.

Asyaroh, S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Terhadap Manajemen Data dan Informasi Perencanaan. *Journal Of Regional Public*

Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1).

Lumabi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberdayaan Untuk Penanggulangan Kemiskinan. *JURNAL POLITICO*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Indonesia

Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

D. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Arifin Faisal Tarigan, S.Sos., M.Si selaku Kabid Perencanaan Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang.

Wawancara Dengan Bapak Fariz Hamzah, S.T., M.T dan Joko selaku Admin
SIPD Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi wawancara dan pengambilan data dengan Kabid Perencanaan Bapelitbang dan admin SIPD





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25